



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
2024**



JL. HARAPAN BARU BLOK, C No. 28

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan kinerja dan penganggaran Perangkat Daerah untuk tahun 2024, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Recana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Sosial, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2018-2023.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Rencana Kerja tahun 2024 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang sosial. Melalui Rencana Kerja ini pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2023
Kepala Dinas Sosial,

SOALIHIN, S. Pd., M.SI.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660717 199103 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	13
2.5. Target Indikator SDGs	19
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL	20
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	20
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	20
3.3. Program dan Kegiatan	21
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
BAB V PENUTUP	28

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD ..	8
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	12
Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	14
Tabel TPB/SDGs Tahun 2024	19
Tabel Program dan Kegiatan	21
Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan dokumen yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Sosial menjabarkan arah pembangunan dalam sektor yang mengacu pada RPD 2024-2025. Rencana Kerja SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik pula yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.2 Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang –Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286;
4. Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pasal 147;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 590);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
17. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor ... Tahun 2023 Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor ... Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor ...);
23. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 41);
24. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor ... Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor ...);

25. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor ... Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024;
26. Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor ... Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2024-2026;
27. Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor ... Tahun 2023 Tentang Pengesahan Renja SKPD Tahun 2024 Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 tahun serta menyelesaikan permasalahan dan menjawab tantangan yang mendesak. berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya mewujudkan sasaran.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial adalah :

1. Sebagai pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan yang diusulkan serta merupakan jabaran dari Renstra agar penyelenggaraan dan pelaksanaannya berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan sinkron dengan arah pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
2. Memantapkan kinerja Dinas Sosial agar lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai visi misi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah untuk mendiskripsikan tentang program program prioritas pembangunan nasional dan daerah yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Rencana Kerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja tahun sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- 1.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengukur suatu aktivitas tertentu baik yang terkait perencanaan, pelaksanaan dan hasil dari pelaksanaan aktivitas. Pada konteks organisasi evaluasi adalah langkah penting dan strategis terutama guna mengukur tingkat pencapaian kinerja kelembagaan baik internal maupun eksternal, dimana hasil rumusan evaluasi pada kelanjutannya dapat menjadi pedoman bagi penentuan kebijakan, strategi dan program organisasi tersebut dimasa yang akan datang. Seiring dengan berkembangnya era reformasi, tuntutan akan reformasi birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menjadi amanat yang harus dijalankan terutama oleh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, dimana objektivitas pengukuran atas akuntabilitas tersebut dapat ditempuh melalui evaluasi sebagai instrumennya.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Dinas Sosial juga perlu untuk mengembangkan mekanisme evaluasi sebagai muatan objektif peningkatan kinerja kelembagaan sebagaimana yang diharapkan bersama, dimana hasilnya akan menentukan pengembangan kebijakan, strategi dan program pembangunan pada urusan sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 yang terkait program, kegiatan dan anggaran sampai dengan Triwulan II belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Catatan-catatan kinerja berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan tahun 2023 masih terus berupaya melakukan pembenahan internal terkait berbagai aspek baik sumber daya manusia, sistem dan prosedur termasuk data dan sarana prasarana penunjang kinerja kelembagaan, termasuk dalam penyusunan berbagai standardisasi pelayanan kinerja kelembagaan.
2. Pelaksanaan pengembangan bidang Sosial yang dilakukan baik secara langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang maupun yang dilaksanakan secara teknis oleh Pihak Ketiga, dimasa mendatang sangat membutuhkan tingkat sosialisasi yang terencana kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat menumbuh kembangkan tingkat kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya atas rasa saling memiliki terhadap pembangunan yang dilaksanakan sehingga dapat mendukung terciptanya pola hubungan harmonis dan sinergis antara pelaksana kegiatan dan masyarakat itu sendiri, yang pada akhirnya akan memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hasil kegiatan dan efektifitas serta efisiensi.

Berikut Tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023:

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Sidenreng Rappang

Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4*100)
	URUSAN SOSIAL								
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Lembaga Kesejahteraan Yang dibina	100	100	100	83	83%	183	183%
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Yang Tertangani	100	100	100	83	83%	183	183%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18	6	6	5	83%	11	61%
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang DiBina	100	100	100	3	3%	103	103%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang Memperoleh Rehabilitasi	100	100	100	100	100%	200	200%
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	45	11	15	15	100%	26	58%

	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	2170	57	2170	2170	100%	2227	103%
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	17	590	1	0%	18	180%
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan verifikasi dan validasi data masyarakat miskin	100	100	100	0	0%	100	100%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat Miskin yang diverifikasi dan validasi serta diberi bantuan sosial	100	100	100	90	90%	190	190%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	31611	12000	12951	11656	90%	23656	75%
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5000	0	12951	0	0%	0	0%
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	100	100	100	100%	200	200%
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Memperoleh Perlindungan Sosial	100	100	100	100	100%	200	200%
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	80	0	80	80	100%	80	100%
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	100	100	100	100	100%	200	200%

	Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	111	37	37	37	100%	74	67%
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani	100	100	100	100	100%	200	200%
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100	100	100	100	100%	200	200%
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	9	1	3	3	100%	4	44%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100		0%	100	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	200	200%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	6	6	6	100%	12	67%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	200	200%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	12	12	12	100%	24	67%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	12	12	12	100%	24	67%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	90	90%	190	190%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	12	12	12	100%	24	67%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	630	210	210	191	91%	401	64%

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100%	200	200%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150	0	50	50	100%	50	33%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150	50	50	50	100%	100	67%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	100	100	100%	200	200%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4500	1500	1500	1500	100%	3000	67%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	12	12	6	50%	18	75%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	12	210	12	6%	24	67%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	0	0%	100	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	39	12	13	11	85%	23	59%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	26	0	13	13	100%	13	50%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	0	1	1	100%	1	50%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang dapat dijadikan pedoman bagi penentuan kebijakan, strategi dan program dinas di masa yang akan datang.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	12	13
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti		100%	100%	100%	73.33%		100%	100%	100%	
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti		100%	100%	100%	90,2%		100%	100%	100%	
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
4	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu-isu penting penyelenggaraan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, diantaranya:

1. Belum maksimalnya data real bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Masih adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum mendapat perhatian dari pemerintah.
3. Penyandang masalah kesejahteraan sosial kurang memiliki keterampilan.
4. Kesenjangan Kesejahteraan Sosial yang cukup tinggi antara masyarakat mampu dan tidak mampu.
5. Sarana dan prasarana lingkungan yang sangat minim.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Adapun review terhadap perbandingan antara RKPD 2024 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	NON URUSAN					NON URUSAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3,001,881,088	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,213,379,946	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	50,063,764	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	31,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Laporan	50,063,764	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	31,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2,249,320,500	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1,885,490,946	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2,244,220,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1,881,990,946	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	5,100,500	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3,500,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	5,360,484	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	0	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	5,360,484	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25 Dokumen	0	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	329,492,300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	103,500,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Dokumen	15,301,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	500,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	314,190,800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210 Laporan	103,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	212,180,800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	149,000,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2,040,200	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan	500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Unit	36,723,600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	173,417,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	120,500,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	155,463,240	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	44,389,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	155,463,240	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	44,389,000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Lembaga Kesejahteraan Yang Dibina	100 Persen	887,487,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Lembaga Kesejahteraan Yang Dibina	100 Persen	52,000,000	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase PSKS Yang Tertangani	100 Persen	887,487,000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase PSKS Yang Tertangani	100 Persen	52,000,000	

	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	887,487,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	52,000,000	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 Persen	387,476,400	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 Persen	1,200,000,000	
		Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Anak Telantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 Persen			Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Anak Telantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 Persen		
		Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 Persen			Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 Persen		
		Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	100 Persen			Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	100 Persen		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi	100 Persen		387,476,400	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi		100 Persen
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	142,046,400	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	500,000,000	

	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	590 Orang	245,430,000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	2170 Orang	700,000,000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	100 Persen	150,824,381	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	94 Persen	500,000,000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	100 Persen	150,824,381	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	94 Persen	500,000,000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	12951 KK	141,400,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	12951 Keluarga	200,000,000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12951 KK	9,424,381	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Keluarga	300,000,000	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 Persen	202,000,000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 Persen	232,000,000	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial	100 Persen	30,300,000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial	100 Persen	200,000,000	

	Penyediaan Makanan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	30,300,000	Penyediaan Makanan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	200,000,000	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	100 Persen	171,700,000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	95 Persen	32,000,000	
	Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Orang	171,700,000	Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Orang	32,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani	100 Persen	81,097,550	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani	100 Persen	20,000,000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 Persen	81,097,550	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 Persen	20,000,000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3 Makam	81,097,550	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3 Makam	20,000,000	
					4,710,766,419					4,217,379,946	

2.5 Target Indikator SDGs

Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2024

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2024
TUJUAN 01 Tanpa Kemiskinan				
Tujuan SDGs 01 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun				
Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.				
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	5,11	4,52
1.3.1.(c)	Presentase Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	KPM	2075	1717
1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan	KPM	10575	10575
TUJUAN : 10 Berkurangnya Kesenjangan				
Tujuan SDGs : Mengurangi Kesenjangan Intra - dan Antar Negara				
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional				
10.1.1*	Koefisien Gini	%	0.354	0.343

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diperoleh melalui musyawarah pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dihadiri oleh berbagai kelompok masyarakat, kepala desa, ormas dan lain sebagainya. Pada Renja Dinas Sosial tahun 2024 tidak terdapat usulan program/ kegiatan dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dimana diperlukan peran masyarakat yang seluas luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing dalam hal ini (*stakeholder*) demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sebab permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara dalam hal ini pemerintah setempat dikarenakan oleh beberapa faktor misalnya data penerima bantuan yang tidak akurat,. Dimana ketidakakuratan data selalu menjadi permasalahan klasik di setiap penyaluran bantuan sosial. Beberapa faktor diduga menjadi penyebab ketidakakuratan data, yaitu belum semua Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial terintegrasi dengan Nomor Induk 14 15 Kependudukan (NIK) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Proses verifikasi dan validasi data juga masih lemah dan lambat. Sehingga masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial dan tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan merupakan sesuatu yang hendak dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu tertentu. Sebagai penjabaran dari misi maka tujuan harus dapat mewujudkan suatu kondisi yang dicapai dimasa mendatang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur. Tujuan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya, sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dan merupakan pejabaran konkrit dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran rencana kerja Dinas Sosial sebagai berikut:

1. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 perlu penjabaran program dan kegiatan sebagai berikut:

Dinas Sosial

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1	2	4
NON URUSAN		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga di Bidang Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Yang Tertangani
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti
		Jumlah Anak Telantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti
		Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti
		Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti

	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang Memperoleh Rehabilitasi
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap
	Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan realisasi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program kegiatan disertai indikator kinerja untuk tahun 2024 dan prakiraan maju rencana tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Sidenreng Raappang

Dinas Sosial

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Urusan/Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9	10
NON URUSAN								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	2,213,379,946	APBD		100 Persen	2,235,513,745
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	31,000,000	APBD		100 Persen	31,310,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	6 Dokumen	31,000,000	APBD		6 Dokumen	31,310,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	1,885,490,946	APBD		100 Persen	1,904,345,855
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	12 Bulan	1,881,990,946	APBD		12 Bulan	1,900,810,855
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	12 Dokumen	3,500,000	APBD		12 Dokumen	3,535,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	0	APBD		100 Persen	4,030,000

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sidenreng Rappang	25 Dokumen	0	APBD		25 Dokumen	4,030,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	103,500,000	APBD		100 Persen	100,505,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Paket	500,000	APBD		12 Paket	505,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	210 Laporan	103,000,000	APBD		210 Laporan	100,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	149,000,000	APBD		100 Persen	150,490,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	1500 Laporan	500,000	APBD		1500 Laporan	505,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	28,000,000	APBD		12 Laporan	28,280,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	120,500,000	APBD		12 Laporan	121,705,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	44,389,000	APBD		100 Persen	44,832,890
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sidenreng Rappang	13 Unit	44,389,000	APBD		13 Unit	44,832,890
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Lembaga Kesejahteraan Yang Dibina	Kab. Sidenreng Rappang	95 Persen	52,000,000	APBD		97 Persen	52,520,000
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Yang Tertangani	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	52,000,000	APBD		97 Persen	52,520,000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	6 Lembaga	52,000,000	APBD		6 Lembaga	52,520,000

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	1,200,000,000	APBD		100 Persen	1,212,000,000
	Jumlah Anak Telantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen				100 Persen	
	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen				100 Persen	
	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen				100 Persen	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	1,200,000,000	APBD		100 Persen	1,212,000,000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	15 Orang	500,000,000	APBD		15 Orang	505,000,000
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	2170 Orang	700,000,000	APBD		2170 Orang	700,000,000
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	10 Orang	0	APBD		10 Orang	7,000,000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	Kab. Sidenreng Rappang	94 Persen	500,000,000	APBD		96 Persen	505,000,000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial	Kab. Sidenreng Rappang	94 Persen	500,000,000	APBD		94 Persen	505,000,000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	12951 Keluarga	200,000,000	APBD		12951 Keluarga	202,000,000
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	55 Keluarga	300,000,000	APBD		55 Keluarga	303,000,000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	232,000,000	APBD		100 Persen	234,320,000

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	200,000,000	APBD		100 Persen	202,000,000
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	300 Orang	200,000,000	APBD		300 Orang	202,000,000
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	32,000,000	APBD		100 Persen	32,320,000
Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	37 Orang	32,000,000	APBD		37 Orang	32,320,000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	20,000,000	APBD		100 Persen	20,200,000
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	20,000,000	APBD		100 Persen	20,200,000
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	3 Makam	20,000,000	APBD		3 Makam	20,200,000
				4,217,379,946				4,259,553,745

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan yang meliputi program dan kegiatan yang didalamnya menggambarkan capaian kinerja dan rencana kinerja anggaran. Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional di bidang sosial. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 tersebut, yang dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan didalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih sering belum sepahaman.
4. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
5. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang Sosial.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2023
Kepala Dinas Sosial,

Soalihin, S. Pd., M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP.19660717 199103 1 018